



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	:	III (dua)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Hari/Tanggal	:	Senin, 6 April 2015 dilanjutkan Selasa, 7 April 2015
Waktu	:	Pukul 10:40 WIB Pukul 14:23 WIB dilanjutkan 14:30 s.d. 21:00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	H.M. Sohibul Iman, Ph.D. / Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. / Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	1. Perkembangan Pelaksanaan Program-Program Strategis Kemendikbud RI TA 2015; 2. Persiapan Pelaksanaan UN 2015; 3. Perkembangan Pelaksanaan Program KIP TA 2015; 4. Perkembangan Penyaluran dana BOS TA 2015, dan 5. Lain-Lain
Hadir	:	36 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Wakil Ketua Komisi X DPR RI / H.M. Sohibul Iman, Ph.D. membuka Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada pukul 10.40 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

Pada hari Senin, 6 April 2015 Rapat ditutup pada pukul 12.55 dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 7 April 2015 pukul 14.00 dengan fokus membahas agenda pertama (Perkembangan Pelaksanaan Program-Program Strategis Kemendikbud RI TA 2015) dan agenda keempat (Perkembangan Penyaluran Dana BOS TA 2015).

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Perkembangan Pelaksanaan Program-Program Strategis Kemendikbud RI TA 2015

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Mendikbud RI tentang program-program strategis Kemendikbud RI TA 2015. Selanjutnya Komisi X DPR RI mendorong Mendikbud RI agar program-program strategis tersebut dilaksanakan secara terukur, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI untuk menyampaikan dokumen lengkap Renstra Kemendikbud RI Tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan berbagai masukan Komisi X DPR RI, selambat-lambatnya tanggal 20 April 2015.

B. Persiapan Pelaksanaan UN 2015

1. Komisi X DPR RI mendorong Mendikbud RI agar pelaksanaan UN Tahun 2015 dapat disiapkan secara maksimal (dari pengiriman Master Naskah, pencetakan, pengepakan, dan pendistribusian naskah). Selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI untuk :
 - a. memastikan ketersediaan prasarana dan sarana khususnya terhadap sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer (CBT-*Computer Based Test*).
 - b. melakukan langkah-langkah strategis khususnya dalam bentuk pengawasan agar pemanfaatan hasil UN sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2015.
 - c. melakukan koordinasi secara intensif dengan Menristekdikti RI khususnya terkait UN sebagai pertimbangan seleksi jenjang yang lebih tinggi.
2. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan melaksanakan kunjungan spesifik dalam rangka persiapan dan pelaksanaan UN ke Provinsi Bali, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8-10 April 2015 dan tanggal 13-15 April 2015.

C. Perkembangan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar TA 2015

1. Komisi X DPR RI menekankan kembali kepada Mendikbud RI agar penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI untuk menyusun Juknis (petunjuk teknis) tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015.
3. Dalam rangka melakukan pengawasan Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat untuk membentuk Panja Program Indonesia Pintar (Panja PIP).

D. Perkembangan Penyaluran Dana BOS TA 2015

Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI agar penyaluran dana BOS TA 2015 tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. penyaluran dana BOS perlu memperhatikan agar pemanfaatannya tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan dasar dan menengah serta anggaran ganda (*double budgetting*) dengan PIP.
- b. mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara intensif terhadap penyaluran Dana BOS TA 2015 tersebut.
- c. mendesak Mendikbud RI untuk mengevaluasi Juknis BOS pendidikan dasar dan menengah.

E. Lain-lain

1. Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI untuk memperhatikan keberlangsungan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI agar mengkaji bersama-sama dengan kementerian lainnya/lembaga lainnya untuk merumuskan pola pengelolaan guru yang lebih baik berdasarkan kewenangan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.00 WIB.

KETUA,



H.M. SOHIBUL IMAN, Ph.D. 